

**ANALISIS TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI STUDI KASUS PADA TK
NEGERI 7 KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Meidika Putra

NIM : 20104090036

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Transformasi Lembaga Pendidikan Swasta Menjadi Lembaga Pendidikan Negeri Studi Kasus TK Negeri 7 Kota Yogyakarta" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 juli 2024

Yang menyatakan



Aditya Meidika Putra

NIM. 20104090036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Asslamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami sejaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Aditya Meidika Putra
NIM	:	20104090036
Judul	:	ANALISIS TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI STUDI KASUS TK NEGERI 7 KOTA YOGYAKARTA

Selain dapat diajukan Kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian nya kami ucapan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juli 2024

Pembimbing Skripsi

Irwanto M.Pd

NIP.199009072019031009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2074/Un.02/DT/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI STUDI KASUS PADA TK NEGERI 7 KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYA MEIDIKA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20104090036
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Irwanto, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66baef223d524



Pengaji I
Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 66bad6bf1f0f2



Pengaji II
Rinduan Zain, S.Ag, MA.
SIGNED

Valid ID: 66bad62ee7b8a



Yogyakarta, 17 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66bb1dbc5d377

MOTTO

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak berhenti mencoba.”¹

(Dzawin Nur Ikram)



¹ Dzawin Nur Ikram, “Stand Up Comedy Malam Kebudayaan Pesantren” (Yogyakarta, 2019), diakses pada 5 Juli 2024 [Https://youtu.be/Jsnhitizrmq?si=7nztwliynctrzize](https://youtu.be/Jsnhitizrmq?si=7nztwliynctrzize).

PERSEMBAHAN

Persembahan Skripsi :

Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Segala puji syukur kepada kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih pada lubu hati yang terdalam kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah membantu peneliti dalam mengikuti perkuliahan di FITK
2. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku Kaprodi MPI yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti selama menjalani perkuliahan di Prodi MPI.
3. Ibu Nora Saiva Jannana, M.Pd., selaku Sekprodi MPI yang telah memberikan saran dan nasehat kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti.
5. Bapak Irwanto M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran dan memberikan petunjuk kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Tenaga Kependidikan di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuan dan layanan kepada peneliti selama perkuliahan
7. Segenap keluarga besar TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan memfasilitasi peneliti dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini.

8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Abdul Gani dan Ibu Yurdaniah yang senantiasa tanpa hentinya memberikan do'a dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan peneliti di "Alegra" MPI angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menerima dan membersamai peneliti semasa perkuliahan sampai terpenuhinya tugas akhir ini.
10. Segenap keluarga besar Futsal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan wadah berkumpul serta berbagi cerita di sela-sela pekerjaan skripsi
11. Kepada pelanggan Kotak Seduh Jogjakarta yang menjadi tempat untuk semakin semangat dalam mengerjakan skripsi dan menggapai impian-impian peneliti.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.



Yogyakarta, 3 Juli 2024
peneliti

Aditya Meidika Putra
NIM. 20104090036

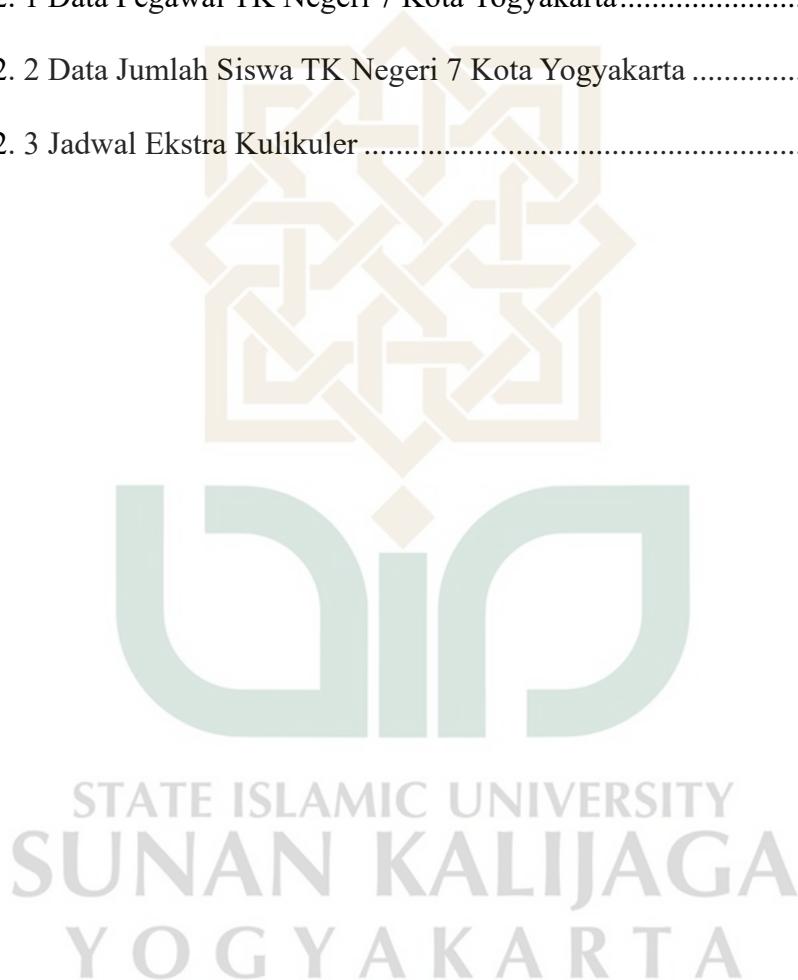
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	20
1. Transformasi Lembaga Pendidikan.....	20
2. Proses Transformasi Bentuk Lembaga Pendidikan.....	21
3. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan.....	30
4. Proses Perubahan Sekolah Swasta Menjadi Negeri	35
F. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Tempat dan Waktu Penelitian	42
3. Subjek Penelitian.....	42
4. Teknik Pengumpulan Data	44
5. Teknik Analisis Data	46
6. Teknik Keabsahan Data.....	48

G. Sistematika Pembahasan	49
BAB II GAMBARAN UMUM	51
A. Sejarah singkat dan perkembangan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	51
B. Letak Geografis TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	52
C. Visi, Misi, dan Tujuan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	53
D. Struktur Organisasi, Data Tenaga Pendidik, Karyawan dan Siswa TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	54
E. Sarana dan Prasarana TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	56
F. Program-program TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	57
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Proses Perubahan Lembaga TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) Menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	59
1. Menelaah dan memahami Kondisi dan keadaan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta (Unfreezing)	59
2. Tahapan Transisi Perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta (Movement) 72	
3. Tahapan keberlanjutan Perubahan TK Negeri 7 kota Yogyakarta (Refreezing)	87
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	99
1. Faktor pendorong perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	100
2. Faktor Penghambat Perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	103
C. Dampak Positif dan Negatif Perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	105
1. Dampak Positif Perubahan yang diterima TK Negeri 7 Kota Yogyakarta 105	
2. Dampak Negatif Perubahan yang diterima TK Negeri 7 Kota Yogyakarta 119	
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	127
C. Penutup	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Kajian Pustaka.....	18
Tabel 2. 1 Data Pegawai TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	55
Tabel 2. 2 Data Jumlah Siswa TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	56
Tabel 2. 3 Jadwal Ekstra Kulikuler	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Letak Sekolah.....	52
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	55
Gambar 3. 1 Proses Belajar Mengajar dok. 2021.....	61
Gambar 3. 2 Gebyar Paud Kota Yogyakarta 2023	63
Gambar 3. 3 Konfercab IGTK Kemantran Mergangsan.....	64
Gambar 3. 4 Pelantikan TP-PKK 2024	67
Gambar 3. 5 Peresmian TK Negeri 5 Kota Yogyakarta secara Daring	74
Gambar 3. 6 Peresmian TK Negeri 11 kota yogyakarta.....	76
Gambar 3. 7 Foto Siswa Tahun 2021	82
Gambar 3. 8 Kepala Skolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta tahun 2021	82
Gambar 3. 9 Dokumentas Guru tahun 2021	82
Gambar 3. 10 Ruang Kelas tahun 2021	82
Gambar 3. 11 Gerbang Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	85
Gambar 3. 12 Teras Kelas TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	85
Gambar 3.13 Halaman Bermain TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	85
Gambar 3.14 APE Luar TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	85
Gambar 3.15 SK Penegerian TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	86
Gambar 3.16 SK Penegerian TK Negeri 7 Kota Yogyakarta Hal.2	86
Gambar 3. 17 Proses Peresmian Penegerian TK N 7,8,9 Kota Yogyakarta	87
Gambar 3. 18 Proses Peresmian Penegerian TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	87
Gambar 3. 19 Proses Penegerian TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	87
Gambar 3. 20 Monumen Peresmian TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	87

Gambar 3. 21 Tata Tertib Guru TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	91
Gambar 3. 22 contoh seragam TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.....	95
Gambar 3.23 Plang Sekolah Ramah Anak TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	97
Gambar 3.24 Alat Tulis	110
Gambar 3.25 Tempat Cuci Tangan.....	110
Gambar 3.26 APE Dalam.....	110
Gambar 3.27 Seragam Tari.....	110
Gambar 3.28 perlombaan Tari.....	115
Gambar 3.29 perlombaan Drum Band	115
Gambar 3.30 Event Kegiatan	115
Gambar 3.31 perlombaan Tari.....	115
Gambar 3. 32 Papan Hak Milik Tanah dan Bangunan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta	122
Gambar 4. 1 Wawancara dengan Tenaga Administrasi Sekolah Nurwintari.....	150
Gambar 4. 2 Wawancara dengan Kepala Sekolah Dra. Lucia Juwarinah	150
Gambar 4. 3 Wawancara dengan Guru Dwi Astuti S.Pd.....	150

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian	133
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	149
Lampiran 3 Data Dokumentasi Wawancara.....	150
Lampiran 4 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	151
Lampiran 5 Bukti Seminar Proposal	152
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penelitian	153
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian	154
Lampiran 8 Surat Keterangan Cek Plagiasi	155
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi.....	156
Lampiran 10 Sertifikat TOEC	157
Lampiran 11 Sertifikat IKLA	158
Lampiran 12 Sertifikat ICT.....	159
Lampiran 13 Sertifikat PKTQ	160
Lampiran 14 Sertifikat <i>User Education</i>	161
Lampiran 15 Sertifikat KKN.....	162
Lampiran 16 <i>Curriculum Vitae</i>	163

ABSTRAK

Aditya Meidika Putra, *Analisis Transformasi Lembaga Pendidikan Swasta Menjadi Lembaga Pendidikan Negeri Studi Kasus TK Negeri 7 Kota Yogyakarta*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

Indonesia memiliki berbagai jenjang pendidikan, salah satunya ialah jenjang pendidikan usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia sangat berkembang pesat dengan menawarkan ciri khusus seperti sekolah alam, sekolah bermuansa budaya, sekolah berbasis agama dan sebagainya. Terbentuknya inovasi baru dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk dari transformasi. Adapula bentuk transformasi lainnya yang kita temui ialah perubahan status lembaga pendidikan swasta yang menjadi pendidikan negeri yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di indonesia dan salah satunya pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk menganalisa dan meneliti terkait Transformasi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang sebelumnya merupakan TK PWS Surokarsan dibawah yayasan PKK Kota Yogyakarta yang telah bertransformasi sejak tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif,. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk keabsahan data dilakukan teknik triangulansi sumber dan triangulansi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) proses transformasi yang dilakukan oleh TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang pertama ialah memahami kondisi ketika sekolah masih berstatus swasta (*unfreezing*) yakni sekolah masih dikelola oleh TP-PKK dan sumber pendanaan sekolah tersebut bersumber dari BOSDA Swasta dan uang SPP. Kedua, langka-langkah perubahan dalam penegerian (*movement*) dimulai dengan pergantian kepala sekolah serta elemen sekolah yang menyertuji perubahan tersebut, tahapan perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Tahap terakhir ialah melakukan penstabilan (*refreezing*) hal itu dilakukan dengan penerapan peraturan dan budaya baru oleh sekolah seperti pergantian pegawai yang bukan ASN. 2) faktor pendorong dari perubahan tersebut ialah bersumber dari faktor internal, yakni dengan pergantian kepala sekolah yang mempunyai pengalaman penegerian pada tahun sebelumnya di TK Negeri 5 Kota Yogyakarta. 3) dampak positif dari perubahan tersebut terlihat pada bertambahnya sumber pendanaan sekolah, yaitu dari BOSDA Negeri, BOP dan uang Komite serta meningkatnya Animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut khususnya ekonomi mengengah kebawah. Dampak negatif dari penegerian tersebut adalah fungsi bangunan yang tidak bisa digunakan oleh kepentingan umum khususnya yang bersifat terus-menerus atau insidental.

Kata kunci : Transformasi, Lembaga Pendidikan, Taman Kanak-Kanak

ABSTRACT

Aditya Meidika Putra, Analysis of the Transformation of Private Educational Institutions into State Educational Institutions, Case Study of State Kindergarten 7, Yogyakarta City. Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta 2024.

Indonesia has various levels of education, one of which is early childhood education. Early childhood education institutions in Indonesia are developing rapidly, offering special characteristics such as natural schools, culturally nuanced schools, religion-based schools and so on. The formation of new innovations in educational institutions is one form of transformation. There is also another form of transformation that we encounter, namely the change in the status of private educational institutions to become state education, which is one of the efforts to improve access and quality of educational services in Indonesia and one of them is at TK Negeri 7 Yogyakarta City. Therefore, researchers are interested in analyzing and researching the transformation of TK Negeri 7 Yogyakarta City, which was previously the PWS Surokarsan Kindergarten under the PKK Kota Yogyakarta foundation which has been transformed since 2021.

This research uses qualitative-descriptive research methods. Data collection techniques use interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then, for data validity, source triangulation and technical triangulation techniques were carried out.

*The results of this research show that: 1) the first transformation process carried out by TK Negeri 7 Yogyakarta City is to understand the conditions when the school still had private status (*unfreezing*), namely that the school was still managed by TP-PKK and the school's funding source came from Private BOSDA and money. SPP. Second, the steps for change in education (*movement*) begin with the change of school principals and school elements who agree to the change. The stages of change in TK Negeri 7 Yogyakarta City follow the procedures set by the Yogyakarta City government. The final stage is stabilizing (*refreezing*), this is done by implementing new regulations and culture by the school, such as replacing employees who are not ASN. 2) The driving factor for this change came from internal factors, namely the replacement of the principal who had educational experience in the previous year at TK Negeri 5 Yogyakarta City. 3) The positive impact of these changes can be seen in the increase in school funding sources, namely from State BOSDA, BOP and Committee money as well as increased public interest in enrolling their children in these schools, especially those from lower middle class economies. The negative impact of this demolition is that the function of the building cannot be used for public purposes, especially those that are continuous or incidental.*

Keywords: *Transformation, Educational Institutions, Kindergarten*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang baru. Kata transformasi sering digunakan untuk merujuk pada perubahan. Kata ini berasal dari bahasa Inggris "transform," yang berarti (1) mengubah dalam komposisi atau struktur; (2) mengubah bentuk atau penampilan luar; dan (3) mengubah karakter atau kondisi.² Dari makna-makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi berarti perubahan dalam komposisi atau struktur, penampilan, atau karakter dari suatu kondisi. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai kondisi, baik internal seperti pola pikir masyarakat maupun eksternal seperti lingkungan. Transformasi dalam pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di indonesia.

Kualitas pendidikan yang dimiliki oleh warga negara merupakan tanda maju tidaknya suatu negara. Dengan adanya pendidikan dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan padanya karena pendidikan dapat mempengaruhi fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketaqwaan manusia.³

² Merriam-Webster, “Transform | Definition of Transform,” diakses tanggal 30 Januari , 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transform>.

³ Zelhendri zen Syafril, “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,” Jakarta : Prenadamedia Group, 2020, hal 38.

Berdasarkan karakter dan sumber daya manusia di Indonesia, negara ini tergolong sebagai negara berkembang atau belum maju. Ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang belum setara dengan standar internasional. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari *The World Top 20 Project*. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai masalah yang belum teratasi, seperti budaya menyontek, kurangnya fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pengajar, dan lainnya. Selain itu, perkembangan zaman yang pesat menambah tantangan yang harus dihadapi, menuntut dunia pendidikan untuk bergerak dengan cepat dalam mengatasinya.⁴ Maka dari itu perlunya upaya dalam meningkatkan layanan dan akses pendidikan di indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan berbagai jenis bentuk lembaga pendidikan. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Bab IV Pasal 13 Ayat 1, menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan di Indonesia Memiliki beberapa jenjang pendidikan formal yang dibagi menjadi 4 jenjang, antara lain Pendidikan usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.⁵ Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 tentang pendidikan Nasional, PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini

⁴ Fajriyatur Robi, “Urgensi Kualitas Pendidik yang Sesuai dengan Kebijakan Pendidikan Dalam Mencapai Standar Nasional Pendidikan,” *Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 409–19.

⁵ Sella Melati, “Jenjang Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang,” *Linov HR*, accessed February 12, 2024, <https://www.linovhr.com/jenjang-pendidikan/>.

adalah salah satu usaha pembimbingan yang mengarah pada anak dari mulai usia awal sampai mencapai enam tahun. Lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia sangat berkembang pesat dengan menawarkan ciri khusus seperti sekolah alam, sekolah berwawasan budaya, sekolah yang berciri khas agama, sekolah entrepreneur, bahkan sekolah internasional yang menawarkan penggunaan bahasa internasional dalam kegiatan pembelajaran.⁶ Ciri khusus tersebut merupakan sebuah inovasi dalam meningkatkan mutu, layanan serta akses pendidikan khususnya pada lembaga anak usia dini.

Data kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan terdapat 5.105 sekolah anak usia dini yang terdiri dari TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Terdapat 2.403 sekolah TK/RA yang terdiri dari 53 TK/RA negeri dan 2.350 TK/RA swasta.⁷ Data di atas menunjukkan perbandingan yang sangat jauh antara lembaga pendidikan Anak usia Dini dengan Status Negeri dan Swasta, sehingga perlunya peningkatan jumlah lembaga pendidikan usia dini dengan status negeri untuk menekan mutu, layanan dan akses pendidikan.

⁶ Nurliyati Rahayu, “Implementasi Strategi Marketing Mix dalam Pemasaran Jasa Pendidikan di Tk Negeri 2 Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2020): 80–101.

⁷ Kemendikbudristek, “Jumlah Data Satuan Pendidikan (Paud) Per Prov. D.I. Yogyakarta,” 2024, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/040000/1/all/34/all>.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 473 Tahun 2021 tentang Pendirian TK Negeri 7, 8 dan 9 di Kota Yogyakarta yang menjelaskan, Sebanyak 3 Taman Kanan-Kanak (TK) di Yogyakarta berubah status menjadi TK Negeri. Tiga TK tersebut, yakni TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, TK Buyung menjadi TK Negeri 8 Kota Yogyakarta dan TK Kuncup Mekar menjadi TK Negeri 9 kota Yogyakarta. perubahan status lembaga pendidikan ini sebagai bentuk komitmen pemkot Yogyakarta untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas mulai dari usia dini serta misi keempat Pemkot Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.⁸

Pada Tahun 2022 Pemkot Yogyakarta kembali menetapkan Dua sekolah swasta yang berubah status menjadi sekolah negeri, sekolah tersebut adalah TK RK Gedongkuning yang berubah menjadi TK Negeri 10 Kota Yogyakarta dan TK Mardi Putra yang kini menjadi TK Negeri 11 Kota Yogyakarta, yang semula TK tersebut di kelola oleh Tim Penggerak PKK Yogyakarta. Kepala Dispora Kota Yogyakarta berpendapat bahwa perubahan status kedua TK menjadi negeri merupakan upaya dari pemerintah kota yogyakarta untuk memberikan akses pendidikan yang

⁸ Bayu-arsita, “Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Yogyakarta Tambah 3 TK Negeri,” sorot.co, diakses 1 Februari 2024, <https://jogja.sorot.co/berita-50596-tingkatkan-kualitas-pendidikan--pemkot-yogyakarta-tambah--3-tk--negeri.html>.

lebih baik kepada masyarakat karena biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah.⁹

Banyaknya perubahan status sekolah swasta menjadi negeri memiliki alasan yang beragam. Sekolah sebagai organisasi akan menghadapi tantangan-tantangan dalam perubahan, tanpa perubahan yang memadai suatu organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri akan mengalami perubahan pada perumusan visi dan misinya kembali agar dapat memberi sumbangsih di dalam proses pendidikan.¹⁰

Dalam regulasi sistem pendidikan nasional, satuan Pendidikan Lembaga sekolah dengan jenjang pendidikan usia dini khususnya PAUD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi layanan PAUD saat ini lebih banyak diselenggarakan oleh masyarakat dibandingkan pemerintah. Pada Provinsi Yogyakarta sendiri, lembaga pendidikan usia dini memiliki perbandingan yang sangat jauh antara kepemilikan lembaga berstatus swasta dengan pemerintah. Seperti yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 5 TK Swasta yang bertransformasi menjadi TK Negeri,

⁹ Eka Arifa, “Yogyakarta Kembali Ubah Dua Status TK Swasta Menjadi Negeri,” Antara Yogyakarta, 2022, <https://jogja.antaranews.com/berita/565865/yogyakarta-kembali-ubah-dua-status-tk-swasta-menjadi-negeri>.

¹⁰ M. Syukri Agersi Diah Anggraini, Aswandi, “Perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Di Kabupaten Sekadau,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 6 (2018): 1–8.

alasan utama nya ialah, karena adanya dorongan masyarakat dan juga bagian dari peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah.¹¹

Penegerian satuan PAUD pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD, yang dianggap sebagai kebutuhan sangat penting. Dengan penegerian, satuan PAUD tersebut akan menjadi milik negara, secara bertahap dibiayai oleh negara, serta diatur dan dikelola oleh pemerintah. Penegerian satuan PAUD juga berarti menyerahkan aset satuan tersebut kepada negara untuk kemudian dikelola oleh pemerintah.¹²

Ada berbagai faktor yang menyebabkan peralihan penyelenggaraan PAUD dari pengelolaan masyarakat ke pemerintah daerah. Proses penegerian satuan PAUD perlu dilakukan dengan komprehensif dan efektif untuk menghindari masalah di masa depan. Namun, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini belum mengatur dengan jelas dan teknis mengenai penegerian atau perubahan status satuan PAUD..

TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) merupakan sekolah jenjang pendidikan usia dini yang bertransformasi menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta. TK Negeri 7 Kota Yogyakarta saat ini sudah mendapatkan

¹¹ eka arifa, "Tiga TK Swasta yogyakarta berubah status menjadi sekolah Negeri," *Antara Yogyo*, 25 November 2021, <https://jogja.antaranews.com/berita/522181/tiga-tk-swasta-yogyakarta-berubah-status-menjadi-sekolah-negeri>.

¹² Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020.

status negeri setelah melewati proses verifikasi oleh tim monitoring dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Kota Yogyakarta. Secara historis, pada tahun 1990-an TK ini bermula didirikan oleh kumpulan persatuan Ibu-ibu Surokarsan, kemudian pada Tahun 2004 menjadi milik Yayasan PKK Surokarsan. Seiring berjalan waktu pemerintah kota dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminta perlu adanya penambahan TK Negeri serta mencari TK Swasta yang layak dan memenuhi syarat menjadi TK Negeri. Dalam proses penegerian terdapat beberapa syarat ketat yang menjadi pertimbangan, antara lain ialah aset hak milik tanah yang jelas, dan kebetulan hak milik tanah sekolah TK tersebut dahulunya memang milik pemerintah kota, serta luas tanah dan sarana prasarana fasilitas dan jumlah murid-pun telah memenuhi krteria. Syarat beroperasi nya TK Negeri juga harus memiliki pegawai terutama Guru yang sudah berstatus ASN, setelah proses penegerian terjadilah perombakan struktur sekolah terutama Pegawai yang di antaranya, 2 guru dan kepala sekolah yang masih berstatus swasta dipindah tugaskan ke TK lain dan Kepala sekolah serta guru yang sudah menjadi ASN mengisi kekosongan di TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, namun masih ada beberapa pegawai swasta yang bertahan menimbang masih diperlukan-nya tenaga pegawai tersebut.¹³

TK Persatuan wanita Surokarsan (PWS) yang sekarang menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta merupakan TK yang memiliki segudang

¹³ "Wawancara Pra-Observasi dengan Lucia Juwarinah, Kepala Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 10 Maret 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.," 2024.

prestasi serta aktif dalam memajukan pendidikan di kota Yogyakarta.

Sebelum menjadi TK Negeri, sekolah yang dahulu berstatus swasta mendapatkan sumber dana dari pemerintah melalui BOP & BOSDA dan juga pembayaran Sumbangan Pebiayaan pendidikan (SPP) serta daftar ulang dari para murid. Kemudian, setelah menjadi TK Negeri sekolah mendapatkan dana penuh dari pemerintah, dan sekolah tidak lagi memberlakukan pembayaran Sumbangan Pebiayaan pendidikan (SPP) dari para murid, sehingga menjadi daya tarik lebih dari masyarakat sekitar.¹⁴

TK Negeri 7 Kota Yogyakarta juga dilengkapi beberapa fasilitas yang memang sudah ada sebelum menjadi sekolah Negeri seperti, satu (1) Taman Bermain, dua (2) ruang kelas, satu (1) ruang kantor, satu (1) ruang perpustakaan, satu (1) ruang Aula, tiga (3) Toilet dan dilengkapi peralatan *meble* berupa meja dan kursi. Setelah menjadi sekolah Negeri, Pemerintah memberikan fasilitas sarana prasarana secara bertahap, berupa tiga (3) unit Komputer, *wastafel* tempat cuci tangan dan sekolah tetap melakukan pengajuan sarana prasarana yang diperlukan secara berkala.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah merekomendasikan untuk membahas topik transformasi lembaga pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan negeri dari sudut pandang PAUD dengan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta sebagai model objek

¹⁴ "Wawancara Pra-Observasi dengan Lucia Juwarinah, Kepala Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 10 Maret 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta."

penelitian nya, dalam meningkatkan akses dan layanan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan PAUD menjadi alasan perlunya dilakukan penelitian terkait transformasi lembaga pendidikan swasta menjadi negeri.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, melalui hasil pr-observasi yang telah dilakukan peneliti dalam menggali fenomena serta permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta menganalisa proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi atau perubahan pada lembaga sekolah swasta menjadi lembaga sekolah negeri dengan studi kasus pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif terhadap perubahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perubahan Lembaga TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta?
3. Apa saja dampak positif dan negatif perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses perubahan Lembaga TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Yogyakarta.
- 3) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan maka diharapkan ada manfaat yang bisa diambil baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut.

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses perubahan lembaga pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan negeri serta memberikan informasi-informasi untuk lembaga terkait tentang proses perubahan tersebut.

2) Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dan rujukan bagi lembaga pendidikan, guru, serta bahan rujukan peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa kajian pokok bahasan yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini ditemukan beberapa penelitian

yang relevan dengan judul Analisis Transformasi lembaga pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan Negeri studi kasus pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, pada topik pertama yang mengkaji mengenai perubahan status sekolah diantara nya sebagai berikut.

Pertama, Penelitian berjudul "Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Sekadau menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau" oleh Agersi Diah Anggraini dan M. Syukri menemukan bahwa status lembaga berubah dari swasta menjadi negeri. Perubahan ini terjadi karena yayasan menghadapi kesulitan dalam pengelolaan, serta dorongan dari masyarakat yang menganggap bahwa madrasah negeri tidak akan memerlukan biaya karena didanai oleh pemerintah. Dukungan juga datang dari Kementerian Agama, Kepala Sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat sekitar yang menginginkan penegerian madrasah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 5 tentang pendirian madrasah oleh pemerintah dan penegerian madrasah oleh masyarakat, penegerian harus memenuhi persyaratan tertentu. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Sekadau memenuhi syarat untuk menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekadau, sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang penetapan 46 Madrasah Ibtidaiyah Negeri.¹⁵

¹⁵ M. Syukri Agersi Diah Anggraini, Aswandi, "Perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Di Kabupaten Sekadau," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 6 (2018): 1–8."

Kedua, Penelitian serupa mengenai perubahan lembaga pada umumnya dilakukan oleh Ahmad Tohirin, Mustiningsih, dan Sulton dengan judul "Proses Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri" pada tahun 2018. Penelitian ini menggali secara mendalam fenomena perubahan status madrasah swasta menjadi negeri yang terjadi di MAN 2 Malang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa MA Miftahul Huda Turen, yang sekarang menjadi MAN 2 Malang, mengubah statusnya atas inisiatif dewan guru, pengurus, komite, dan tokoh masyarakat. Alasan perubahan status tersebut meliputi: pertama, karena di Kecamatan Turen belum ada madrasah aliyah berstatus negeri; kedua, untuk meningkatkan daya saing antar sekolah di Kecamatan Turen; dan ketiga, karena keterbatasan finansial madrasah. Tujuan perubahan status ini adalah agar madrasah lebih maju, terus berkembang, dan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penegerian Madrasah menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2007: 7), yang menyatakan bahwa tujuan umum penegerian madrasah adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan madrasah agar lebih maju, mandiri, profesional, dan memiliki daya saing global.¹⁶

Penelitian ini memiliki aspek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agensi Diah dan M. Syukri, yakni mengenai perubahan status madrasah swasta menjadi madrasah negeri dengan melihat fenomena-fenomena yang

¹⁶ Ahmad Tohirin, "Proses Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri," *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 1, no. September (2018): 270–78.

terjadi. Sehingga, dalam penelitian pada man 2 malang tersebut dengan madrasah ibtidaiyah negeri sekadau mendalam mengenai mengapa sekolah tersebut mengalami perubahan serta terdapat sedikit tidaknya menggali mengenai historis yang ada didalamnya.

Ketiga, topik yang membahas lebih detail terkait historis dari sebuah lembaga swasta yang menjadi lembaga pendidikan negeri dilakukan pada penelitian yang berjudul "Man 1 Surakarta dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 – 1977" oleh Atta Bhika Khoir merupakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan analisis diakronis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sejarah MAN 1 Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi lapangan, studi pustaka, dan wawancara, yang kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan untuk menghasilkan tulisan sejarah.

Hasil penelitian menyoroti implikasi pendirian MAN 1 Surakarta, khususnya dalam mencapai kesetaraan dengan sekolah umum. Setelah didirikan, MAN 1 Surakarta mempengaruhi perubahan kurikulum madrasah nasional, standarisasi mata pelajaran, dan pemberian status ijazah madrasah yang setara dengan sekolah umum. Dengan demikian, dalam konteks ini, madrasah dianggap setara dengan sekolah umum, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih adil dan setara antara pendidikan umum dan pendidikan Islam.¹⁷ Topik yang dibahas dalam penelitian ini merupakan bentuk

¹⁷ Atta Bhika Khoir, "MAN 1 Surakarta dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945-1977," *Universitas Raden Mas Said Surakarta* 4, no. 1 (2023): 1–23.

dalam pergeseran perubahan yang ada, penegerian yang dilakukan adalah upaya untuk memenuhi standar upaya nasional yang ditetapkan agar sekolah tersebut menjadi setara dengan sekolah umum lainnya. Selain itu pada penelitian lain membahas lebih dalam lagi terkait pengaruh penegerian dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Keempat, penelitian selanjutnya membahas mengenai pengaruh dari sebuah perubahan pada sekolah yang menjadi negeri, Studi yang berjudul "Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur" oleh Abdul Majir dan Yohanes Kurniawan menggambarkan konsep manajemen pendidikan di madrasah, peran stakeholder, serta dampak penegerian madrasah terhadap pelaksanaan manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan orientasi interpretatif atau post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegerian madrasah berdampak positif terhadap manajemen madrasah yang lebih transparan, akuntabel, kolaboratif, koordinatif, sambil tetap mempertahankan karakteristik madrasah. Model manajemen partisipatif yang berbasis *religiusitas* menjadi dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Manggarai.¹⁸

¹⁸ Yohanes Kurniawan Abdul Majir, "Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (n.d.): 155–71, <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p270>.

Kelima, penelitian yang serupa mengenai pengaruh terhadap penegerian juga dilakukan oleh peneliti dalam Studi yang berjudul "Dampak Perubahan Status Sekolah Menjadi Sekolah Negeri Pada Sikap Siswa Program Studi Teknik Survey Pemetaan SMK PU Negeri Jawa Barat" oleh Nafsa Ariana dilakukan di SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung. Penelitian ini mengkaji masalah dampak perubahan status sekolah menjadi sekolah negeri terhadap sikap siswa dalam Program Keahlian Teknik Survey Pemetaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan penyebaran angket dan tes dengan model skala Likert dan Guttman, yang kemudian dianalisis menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap pemahaman tentang perubahan status sekolah (variabel X) dan sikap siswa terhadap perubahan tersebut (variabel Y) cenderung baik. Dari analisis regresi sederhana, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang perubahan status sekolah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap siswa. Berdasarkan temuan ini, disarankan kepada sekolah untuk meningkatkan sosialisasi kepada siswa yang mengalami perubahan status sekolah agar mereka dapat beradaptasi dengan lebih baik. Selain itu, siswa juga diharapkan untuk lebih mendalamai pengetahuan tentang status sekolah guna memperdalam pemahaman mereka.¹⁹

¹⁹ Nafsa Ariana, "Studi Dampak Perubahan Status Sekolah Menjadi Sekolah Negeri pada Sikap Siswa Program Studi Teknik Survey Pemetaan SMK PU Negeri Jawa Barat," *Universitas Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.

Penelitian tersebut memiliki implikasi terhadap pengaruh dari sebuah perubahan. Dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan perspektif antara kedua judul tersebut, yang pertama menghasilkan sebuah output bahwa pengaruh perubahan tersebut berdampak positif terhadap manajemen madrasah yang lebih transparan, akuntabel, kolaboratif, koordinatif, sambil tetap mempertahankan karakteristik madrasah, sedangkan penelitian pada SMK PU Negeri Jawa Barat mengenai persepsi mahasiswa terhadap pengaruh perubahan yang ada serta memahami kondisi serta sikap siswa atas perubahan tersebut.

Ke-enam, topik terakhir yaitu membahas mengenai evaluasi dari sebuah transformasi lembaga pendidikan swasta ,emjadi pendidikan negeri pada Penelitian "Evaluasi Penegerian Madrasah" oleh Farida Hanum bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan madrasah setelah menjadi negeri. Penelitian ini menggunakan metode survei pada Madrasah Negeri (MI, MTs, dan MA) di 12 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan madrasah yang dinegerikan, mencakup perekutan, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan kesiswaan. Kedua, kendala dalam pengelolaan madrasah meliputi keterbatasan sarana prasarana, rendahnya anggaran pemerintah, dan kurangnya kompetensi guru. Ketiga, kebijakan penegerian madrasah memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa serta meningkatnya minat masyarakat. Keempat, strategi pemerintah untuk

meningkatkan kualitas madrasah mencakup perbaikan manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, dan hubungan masyarakat.²⁰ Dari kajian pustaka mengenai evaluasi tersebut mandapatkan sebuah gambaran bahwa penjabaran terhadap penegerian sekolah tersebut serta hal-hal yang dapat menjadi evaluasi selanjutnya bagi sekolah sebagai pertimbangan dalam memaksimalkan perubahan tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, terdapat topik yang dapat teliti kembali dan digunakan dalam lingkup permasalahan atau topik yang akan peneliti bawa pada penelitian skripsi ini, sehingga menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti pada fokus masalah, objek dan subjek kebaruan (*novelty*) yang diteliti. Permasalahan yang di angkat oleh penelitian sebelumnya merupakan berbagai fenomena transformasi atau perubahan yang terjadi pada status lembaga tetapi dari pandangan kebijakan dan peraturan yang contohnya ditetapkan oleh Kemenag yang menaungi Madrasah, dan pada penelitian lainnya ada pula yang membahas mengenai pengaruh, dampak dan evaluasi transformasi sekolah sebagai fokus utama penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi atau perubahan yang terjadi pada PAUD yang merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan Kemendikbud dan batas masalah penelitian peneliti ialah membahas mengenai bagaimana proses, dampak positif dan negatif dan juga faktor pendukung dan penghambat Transformasi lembaga

²⁰ Farid ah Hanum, “Evaluasi Penegerian Madrasah,” *Al-Qalam* 21, no. 2 (2016): 235, <https://doi.org/10.31969/alq.v21i2.230>.

pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan negeri. Fokus penelitian yang ditetapkan peneliti merupakan topik yang sangat jarang dibahas oleh penelitian terdahulu sehingga menghasilkan sebuah *Novelty* atau nilai kebaruan dalam penelitian. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transformasi Lembaga Pendidikan Swasta Menjadi Lembaga Pendidikan Negeri Studi Kasus Pada 7 Kota Yogyakarta”.

Tabel 1. 1 Daftar Kajian Pustaka

No.	Judul & Penulis	Fokus penelitian sebelumnya	Fokus Penelitian peneliti
1.	Perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Sekadau menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau, oleh Agensi Diah Anggraini dan M. Syukri	penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemenag yaitu Madrasah.	Penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD.
2.	Proses Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri. Oleh Ahmad Tohirin, Mustiningsih dan Sultoni pada tahun 2018	penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemenag yaitu Madrasah.	Penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD
3.	Man 1 Surakarta dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 – 1977 oleh Atta Bhika Khoir	Penelitian ini berfokus terhadap Pendirian MAN 1 Surakarta berdampak pada kesetaraan dengan sekolah umum, mencakup perubahan	Penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta

		kurikulum madrasah nasional, standarisasi mata pelajaran, dan status ijazah yang setara dengan sekolah umum.	kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD
4.	Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur Oleh Abdul Majir, Yohanes Kurniawan	Penelitian ini membahas tentang konsep Manajemen pendidikan di madrasah, peran para pemangku kepentingan, serta dampak penegerian madrasah terhadap manajemen peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur.	Penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD
5.	Studi Dampak Perubahan Status Sekolah Menjadi Sekolah Negeri Pada Sikap Siswa Program Studi Teknik Survey Pemetaan SMK PU Negeri Jawa Barat oleh Nafsa Ariana	Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah perubahan status sekolah menjadi sekolah negeri yang mengakibatkan adanya kesenjangan sikap siswa pada Program Keahlian Teknik Survey Pemetaan	penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD
6.	Evaluasi Penegerian Madrasah oleh Farida Hanum	Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas penyelenggaraan madrasah setelah dinegerikan. Evaluasi penegerian madrasah dilakukan dengan metode survei pada Madrasah Negeri (MI, MTs, dan MA) di 12 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Riau, Bangka	Penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi dari aspek kepemilikan dan perubahan status lembaga serta kebijakan peraturan yang ditetapkan Kemendikbud yaitu PAUD

		Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali.	
--	--	--	--

E. Kerangka Teori

1. Transformasi Lembaga Pendidikan

Transformasi berasal dari kata transformation yang memiliki arti perubahan bentuk. Kata tersebut berasal dari kata transform yang berarti perubahan bentuk, atau juga kondisi serta struktur. Apabila menjadi sifat sesuatu, transformasi menjadi *transformatic* yang bisa diartikan sebagai perombakan nilai-nilai. Menurut WJS. Poerwadarminta, dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai memperbarui cara serta membangun adat dengan sebuah prosesi. Artinya, transformasi dijelaskan sebagai proses perbaruan total dari suatu bentuk menjadi sosok baru sebagai tahap akhir sebuah proses perubahan.²¹

Kemajuan zaman secara global telah menunjukkan bahwa kebutuhan manusia semakin meningkat pesat ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Di era revolusi industri, mempunyai wawasan yang luasa tidak menjamin seseorang bisa bersaing secara global. Maka dibutuhkan nya

²¹ Purwo Djatmiko, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," surabaya: Anugerah,.

beragam keahlian yang spesifik dalam menghadapi kebutuhan zaman yang sangat kompleks.²²

Lembaga pendidikan berperan sebagai tempat untuk membina calon tenaga profesional yang dapat mendukung pembangunan sejalan dengan kemajuan budaya manusia. Di dalam lembaga pendidikan, penting untuk memahami struktur organisasi yang melibatkan tenaga profesional. Untuk tata kelola sumber daya manusia yang efektif di lembaga pendidikan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan lembaga, serta promosi jaringan internal dan eksternal.²³ Maka lembaga pendidikan akan lebih maju bila memiliki jiwa kerja sama yang kuat dan erat untuk meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan.

Transformasi lembaga pendidikan merupakan pengembangan dan perubahan yang terjadi didalam lembaga pendidikan, dengan transformasi atau perubahan tersebut, beberapa hal akan berubah secara struktur, sistem serta hal hal yang mempengaruhi setelah terjadinya tahap akhir dalam transformasi.

2. Proses Transformasi Bentuk Lembaga Pendidikan

Di era modern ini, persaingan di bidang pendidikan semakin ketat, dan berbagai strategi digunakan untuk memikat perhatian masyarakat dan

²² Mohammad Nuruddhalam Bakri, “Transformasi Sistem Lembaga Pendidikan Pada Yayasan Najmhi Dhabit Kiram Pakualaman Yogyakarta,” *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, 1–91.

²³ Fery Diantoro et al., “Implementasi Manajemen Personalia Pendidikan Islam Berbasis Pengabdian di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar , Jawa Timur” 5 (2020): 137–54.

para pemangku kepentingan eksternal agar tertarik pada lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut selalu berupaya mengembangkan diri dengan melakukan transformasi secara menyeluruh, bertahap, atau total, karena esensi dari transformasi adalah adanya perubahan yang signifikan.²⁴

Seperti yang dijelaskan oleh Robbins (1999: 380), perubahan merujuk pada setiap alterasi yang terjadi pada manusia, struktur, atau teknologi. Dalam konteks sekolah, perubahan berarti fokus pada modifikasi aspek sumber daya yang mencakup manusia sebagai sumber daya utama, organisasi sekolah, dan peralatan pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Transformasi dalam lembaga pendidikan sering kali mengadopsi teori manajemen perubahan. J. Winardi mendefinisikan manajemen perubahan sebagai upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, dengan memahami aspek-aspek seperti motivasi, kepemimpinan, konflik, kelompok, dan komunikasi.²⁵

Manajemen perubahan, menurut Wibowo, merupakan sebuah proses terencana dan sistematis untuk menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan agar dapat mempengaruhi perubahan pada individu yang terkena dampak dari proses tersebut. Dengan demikian,

²⁴ Hubbil Khair, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Kegamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 12 (2021): 24–36"

²⁵ Suriya Jaya, "Manajemen Perubahan di Sekolah," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. April (2021): 82–94.

pendekatan manajemen perubahan bertujuan untuk meningkatkan kondisi di masa depan dengan lebih baik, terutama dalam hal sumber daya manusia dan struktur organisasi, baik dari sudut pandang individu maupun organisasional.²⁶

Salah satu teori klasik yang dikutip dalam buku manajemen perubahan yang ditulis oleh eri marlapa dan juga desy pristiani dalam bukunya yang berjudul modul manajemen perubahan dan pengembangan : teori kurt lewin dan jhon koter dalam manajemen perubahan adalah Teori Kurt Lewin yang dikenal dengan Model Lewin. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk melakukan perubahan terencana dan berkelanjutan dalam manajemen organisasi. Teori Lewin menekankan bahwa dalam menghadapi tekanan atau tantangan, organisasi perlu melakukan perubahan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Teori tersebut sangat cocok untuk digunakan dalam kerangka penelitian guna menyusun pertanyaan-pertanyaan menggunakan indikator yang berdasarkan dari teori Kurt Lewin tersebut. Kurt Lewin menjelaskan bahwa perubahan terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Teori ini fokus pada pertanyaan "mengapa" individu, kelompok, atau organisasi mengalami perubahan. Lewin mengeksplorasi bagaimana perubahan dapat dikelola sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan.

²⁶ suriya jaya, "Manajemen Perubahan di Sekolah," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. April (2021): 82–94.

Lewin menyimpulkan bahwa kekuatan dorongan (*driving forces*) bertentangan dengan keengganan (*resistances*) untuk berubah, dan perubahan dapat dicapai dengan memperkuat kekuatan dorongan atau mengurangi keengganan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Lewin merumuskan langkah-langkah untuk mengelola perubahan, yaitu melalui tahap *unfreezing*, *changing (movement)*, dan *refreezing*.²⁷

Metode Lewin atau sering disebut *Lewin's three step model* terdiri dari tiga fase, yaitu *unfreezing – movement – refreezing*. Dalam kerangka teori yang menggunakan *Lewin three step model* akan menjabarkan gambaran bagaimana data dari penelitian ini akan diperoleh seara kompleks. Adapun berikut penjelasan dari tahapan tersebut:

1) *Unfreezing*

Fase pertama merupakan proses pencairan atau pemahaman konsidisi yang ada di dalam sebuah lembaga. dalam sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan penelitian, tahapan pengenalan kondisi yang sudah lama terjadi akan mendapatkan sebuah jawaban dengan menimbang beberapa faktor aktivitas yang secara umum, fase ini berisi tiga aktivitas sebagai berikut:

²⁷ Desy Prastyani, “Model Perubahan Kurt Lewin dan John Kotter,” In *Modul Manajemen Perubahan Dan Pengembangan*, 2020, 0–22.

- a) Menelaah dan memahami *status quo* atau keadaan organisasi/lembaga saat ini untuk melihat antara keadaan saat ini dengan keinginan yang diharapkan. Dalam
 - b) Penekanan terhadap faktor-faktor untuk perubahan.
 - c) Mengurangi faktor-faktor yang bersifat penolakan atau *resisten* terhadap perubahan.
- 2) *movement*

Tahap movement atau proses transisi melibatkan analisis perbedaan antara keinginan (*desire status*) dan *status quo* (keadaan saat ini), serta mengevaluasi program-program perubahan yang sesuai untuk menghadapi resistensi terhadap perubahan. Movement merupakan salah satu indikator yang sangat penting ada kerangka teori yang digunakan dalam *Lewin three step model* ini, peneliti akan menjabarkan secara dalam apa yang terjadi dalam proses perubahan lembaga dengan pertanyaan yang menggunakan dasar indikator dari buku panduan penegerian PAUD yang disusun oleh Kemendikbud. Sehingga Tujuan akhir dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi serta memahami bagaimana dan apa saja proses perubahan tersebut yang terjadi.

- 3) *refreezing*

Pada fase ini, yang disebut dengan *refreezing* atau Tahap Pembekuan Kembali, fokus utama adalah memastikan bahwa perilaku baru

menjadi stabil dan berkelanjutan. Ini merupakan periode di mana perubahan yang telah terjadi dikukuhkan dengan membantu individu yang terpengaruh untuk mengintegrasikan perilaku dan sikap baru ke dalam kebiasaan sehari-hari. Refreshing yang akan peneliti lakukan akan mendalam mengenai dampak-dampak, kebijakan serta adanya indikasi hal yang baru, hal itu sendiri sesuai dengan teori Lewin yaitu untuk memperkuat perubahan yang dilakukan, dapat dilakukan melalui penetapan aturan dan kebijakan baru, penciptaan budaya baru, serta penerapan sistem penghargaan terhadap perubahan tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perubahan akan mencapai kestabilan dan menjadi bagian dari pola kerja yang baru.²⁸

Dengan menerapkan tiga fase perubahan Lewin, yaitu unfreezing, changing, dan refreezing, organisasi dapat memperbanyak kekuatan pendukung dan mengurangi kekuatan penolak. Metode Lewin digunakan sebagai landasan utama dalam penyusunan kerangka teori manajemen perubahan dalam penelitian ini karena secara efektif memungkinkan organisasi untuk berhasil dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan perubahan.

Perubahan dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Di sekolah, tidak semua

²⁸ Desy Prastyani, “Model Perubahan Kurt Lewin Dan John Kotter,” In *Modul Manajemen Perubahan Dan Pengembangan*, 2020, 0–22.

pihak selalu mendukung perubahan. Seringkali terdapat penolakan dari komite sekolah, guru, karyawan sekolah, dan bahkan siswa. Penolakan ini, yang disebut resistensi, dapat menjadi faktor penghambat dalam proses perubahan.²⁹

Menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perubahan dalam lembaga pendidikan, peneliti menggunakan indikator dalam Teori Beckhardt dan Harris yang menyampaikan bahwa dukungan manajemen menjadi sangat penting dalam upaya kesiapan perubahan. Beckhardt dan Harris berpendapat bahwa perubahan akan berubah bila ada sejumlah syarat, yaitu:

- 1) Manfaat-biaya, artinya ialah manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari pada biaya perubahan
- 2) Persepsi hari esok. Artinya ialah individu dalam lembaga menggambarkan hari esok dipersepsikan menjadi lebih baik.
- 3) Ketidakpuasan, bahwa merasa adanya ketidakpuasan terhadap kondisi dan keadaan yang di alami
- 4) Cara yang praktis, artinya bahwa ada hal yang praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi kondisi sekarang dan melakukan perubahan.³⁰

²⁹ Stephen P Robbins, Marry, *Management* (new jersey: Pearson Prentice Hall., 2007).

³⁰ Eri Marlapa, “Definisi Dan Konsep Manajemen Perubahan,” in *Manajemen Perubahan*, 2018.

Ada banyak faktor yang bisa mendorong lembaga untuk melakukan perubahan. Robert Kreitner dan Angelo Kinicki dalam bukunya mengatakan bahwa ada dua kekuatan yang dapat mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan di dalam lembaga, faktor tersebut ialah faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal

Kekuatan eksternal berupa karakteristik Demografis seperti Usia Pendidikan, tingkat keterampilan, jenis kelamin dan semacamnya, kemudian adanya perkembangan teknologi serta tekanan sosial dan politik yang terjadi merupakan faktor-faktor yang nantinya mendorong untuk melakukan perubahan

2. Faktor internal

Faktor internal merupakan kekuatan atau dorongan yang muncul dari dalam lembaga, faktor tersebut seperti masalah-masalah kebutuhan sumber daya manusia yang kurang terpenuhi, adanya ketidakpuasan kinerja, produktifitas sekolah yang kurang berkembang, hingga motivasi kerja dan perilaku manajemen yang dibutuhkan merupakan faktor internal yang muncul dalam suatu lembaga

Menurut andersen dalam buku eri marlapa yang telah disimpulkan bahwa faktor yang menghambat terjadinya perubahan ialah diantaranya :

1. Kelambanan dalam struktur organisasi dan dinamika kelompok kerja.
2. Tantangan untuk menjaga keseimbangan kekuatan yang ada.

3. Upaya perubahan sebelumnya mengalami kegagalan.
4. Terlalu terfokus pada perubahan yang terbatas dalam lingkupnya.
5. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah terbentuk.
6. Ancaman terhadap pengalokasian sumber daya yang sudah tersedia.
7. Faktor demografis yang mempengaruhi dinamika organisasi.
8. Persepsi terhadap dampak dari revolusi informasi yang sedang berlangsung.
9. Pengaruh lingkungan dan faktor sosial dalam konteks perubahan organisasi.

Untuk mengetahui bahwa perubahan tersebut menghasilkan sebuah dampak, maka perlu untuk mengidentifikasi Dampak yang terjadi dari sebuah perubahan. Eri Marlpa dalam bukunya berpendapat bahwa perencanaan yang matang akan perubahan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja Lembaga. sebuah perubahan akan menjadi bagus tergantung bagaimana kita menyikapinya, terutama pemimpin yang mempunyai wewenang harus bijaksana dalam menanggapi sebuah perubahan dan mengambil langkah dalam menyikapi perubahan tersebut.

Menyikapi perubahan serta mengambil langkah yang ada akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya ialah dampak positif dan negatif. Dampak positif merupakan dampak yang dihasilkan jika proses perubahan sesuai dengan keadaan sekitar dan dampak positif akan terasa lebih bermanfaat ketika dirasa sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Dampak negatif sebuah perubahan terjadi akibat ketidaksinambungan antara hal yang terjadi dengan cara penanganannya serta, kurangnya koordinasi yang ada antar sesama komponen lembaga.³¹

3. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan

a. Lembaga pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan primer dan dominan. Ini disebabkan karena keluarga merupakan tempat pertama di mana anak menerima pendidikan, dan hampir seluruh pendidikan awal yang diterima anak berasal dari lingkungan keluarga tersebut.³² Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan paling awal yang bersifat informal dan alami. Peran orang tua sebagai pengajar, dan anak sebagai muridnya. Keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk dasar-dasar, khususnya dalam pendidikan moral dan perspektif keagamaan. Lingkungan pendidikan keluarga ini sangat menentukan, karena dari sanalah keseimbangan emosional individu dalam perkembangannya selanjutnya terbentuk.³³

Adapun beberapa fungsi dari lembaga pendidikan keluarga yang dapat dijabarkan :

- a) Pengalaman pertama masa kanak-kanak

³¹ Eri Marlapa, “Definisi Dan Konsep Manajemen Perubahan,” in *Manajemen Perubahan*, 2018.

³² fuad ihsan, ed., *Dasar-dasar kependidikan* (jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997, n.d.).

³³ Hubbil Khair, “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat di Era Modern,” *Jurnal Ilmiah Kegamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 12 (2021): 24–36”

Pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang krusial dalam perkembangan pribadi anak. Lingkungan pendidikan keluarga ini sangat mempengaruhi, karena dari situ keseimbangan emosional individu dalam perkembangannya selanjutnya ditentukan.

b) Menjamin kehidupan emosional anak

Melalui pendidikan keluarga ini, kebutuhan emosional akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau berkembang dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didik, yang berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang.

c) Menanamkan dasar pendidikan moral

Dalam konteks ini, K. Hajar Dewantara menyatakan bahwa perasaan cinta, persatuan, dan lain-lain kondisi emosional yang umumnya sangat penting untuk proses pendidikan, terutama pendidikan karakter atau budi pekerti, hanya dapat terwujud dalam kehidupan keluarga.

d) Memberikan dasar pendidikan sosial

Dalam kehidupan keluarga, merupakan landasan yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar pendidikan sosial anak. Hal ini karena keluarga pada dasarnya adalah unit sosial resmi yang paling minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

e) Peletakan dasar-dasar keagamaan

Keluarga sebagai pendidikan primer yang sangat krusial tidak hanya dalam menanamkan dasar-dasar moral, tetapi juga berperan besar dalam proses internalisasi dan integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam kepribadian anak.

Penjelasan fungsi lembaga pendidikan pada tingkat keluarga ini menyimpulkan bahwa kelurgalah yang memberikan pengalaman pertama bagi anak, dalam memenuhi kehidupan emosional anak, untuk menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan yang terpenting adalah peletakan dasar-dasar keagamaan sebagai makhluk relegius.³⁴

b. Lembaga pendidikan sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan penting sebagai wahana untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Beberapa karakteristik sekolah meliputi:

- a) Diselenggarakan secara khusus dan terbagi atas jenis dan jenjang yang memiliki struktur hierarkis.
- b) Anak didik dalam satu jenjang pendidikan memiliki usia yang relatif homogen.

³⁴ Hubbil Khair, “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat di Era Modern,” *Jurnal Ilmiah Kegamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 12 (2021): 24–36.

- c) Waktu pendidikan relatif panjang sesuai dengan program yang harus diselesaikan.
- d) Materi atau kurikulum pendidikan lebih dominan bersifat akademis dan umum.
- e) Terdapat penekanan pada kualitas pendidikan sebagai jawaban atas kebutuhan masa depan.

Sekolah lahir dan berkembang dengan efektif dan efisien melalui partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga yang melayani masyarakat, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mendidik warga negara. Peran lembaga pendidikan sekolah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Tempat di mana anak didik belajar untuk berinteraksi dengan sesama, guru, dan karyawan.
- b) Tempat di mana anak didik belajar untuk mentaati peraturan sekolah.
- c) Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara..³⁵

Selanjutnya, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki fungsi pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab sebagai berikut:

³⁵ Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan* (bandung: angkasa, 1981).

- a) Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan, seperti UUSPN Nomor 20 Tahun 2003.
- b) Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa.
- c) Tanggung jawab fungsional sebagai tanggung jawab profesional dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, yang diatur berdasarkan peraturan jabatannya.³⁶

Dalam pengelolaan lembaga pendidikan, Indonesia merupakan negara dengan berbagai jenis bentuk lembaga pendidikan. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Bab IV Pasal 13 Ayat 1, menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan di Indonesia Memiliki beberapa jenjang pendidikan formal yang dibagi menjadi 4 jenjang, antara lain Pendidikan usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.³⁷

Kepemilikan Lembaga pendidikan indonesia sebagian besar dibawah naungan pemerintah atau yang biasa disebut negeri dan juga dibawah naungan yayasan, komunitas, klan dan sebagainya dan biasa disebut Swasta. Lembaga pendidikan anak usia dini atau yang disingkat

³⁶ hasbullah, *Dasar-dasar ilmu pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

³⁷ sella melati, “Jenjang Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang.”

PAUD juga merupakan lembaga pendidikan yang di sah kan pemerintah Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 tentang pendidikan Nasional, PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu usaha pembimbingan yang mengarah pada anak dari mulai usia awal sampai mencapai enam tahun.

4. Proses Perubahan Sekolah Swasta Menjadi Negeri

Penelitian yang akan dilakukan memiliki sebuah pertanyaan yang harus di jawab, pertanyaan yang disusun harus berdasarkan dari indikator yang relevan dengan kerangka teori yang peneliti gunakan, sehingga peneliti mempunyai korelasi dari pertanyaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman yang mendasar terkait aturan kebijakan dari sebuah lembaga pendidikan PAUD.

Keberadaan satuan PAUD memiliki hubungan erat dengan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mewujudkan satuan PAUD yang memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam regulasi sistem pendidikan nasional, satuan Pendidikan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Saat ini, mayoritas layanan PAUD dikelola oleh masyarakat dibandingkan dengan pemerintah³⁸ pendirian satuan PAUD harus memenuhi klasifikasi yang ada di dalam standar pendidikan nasional, yang telah diatur oleh pemerintah PP Nomor 4 tahun 2022 yang diantaranya ialah :

³⁸ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020. hal 3.

- 1) Standar isi
- 2) Standar proses
- 3) Standar penilaian
- 4) Standar kompetensi lulusan
- 5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- 6) Standar sarana dan prasarana
- 7) Standar pengelolaan
- 8) Standar pembiayaan

Penerapan standar pendidikan nasional ini memiliki fungsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. standar pendidikan nasional menjadikan pendidikan indonesia selaras dengan tuntutan global, serta menjadi tolak ukur keseragaman mutu bagi sekolah yang ada di indonesia dan hal yang tidak kalah penting lainnya ialah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar. Lembaga Pendidikan PAUD tentunya harus memenuhi semua kriteria, indikator yang telah di tetapkan pemerintah.³⁹ Sementara itu, untuk kualifikasi guru yang harus dimiliki oleh guru PAUD ialah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).⁴⁰

³⁹ Eka, “Mengenal 8 Standar Pendidikan Nasional: Pedoman untuk Keseragaman Mutu Pendidikan,” Guru Inovatif, 2023. Di akses pada 7 agustus 2024, pukul 12.20 WIB.

⁴⁰ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,” 2014.

Satuan PAUD mencakup Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD lainnya yang serupa. Taman Kanak-kanak, disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan untuk anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun, dengan prioritas diberikan kepada anak-anak berusia 5 dan 6 tahun.⁴¹

Penegerian dapat diterapkan pada satuan PAUD, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Pada dasarnya, penegerian satuan PAUD adalah langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD, yang dianggap sebagai kebutuhan krusial (sebagai layanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota). Ketika satuan PAUD dinegerikan, hal ini berarti satuan tersebut akan menjadi milik negara, didanai oleh negara secara bertahap, serta diatur dan dikelola oleh pemerintah. Penegerian satuan PAUD berarti penyerahan aset satuan tersebut kepada negara untuk selanjutnya dikelola oleh pemerintah.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan peralihan pengelolaan PAUD dari masyarakat ke Pemerintah Daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) tingginya kebutuhan akan akses layanan PAUD, sedangkan jumlah satuan PAUD yang terjangkau oleh masyarakat masih terbatas; (2) beratnya beban pengelolaan satuan PAUD; (3) tingginya kebutuhan dana, sementara kontribusi finansial dari masyarakat kurang memadai; (4)

⁴¹ kemendikbud, Hal 5-6.

banyaknya pengelola dan pendidik yang bekerja secara sukarela (*volunteer*); dan (5) rendahnya penjaminan mutu, meskipun masyarakat sangat membutuhkan layanan PAUD yang berkualitas tinggi.⁴²

Penegerian PAUD bisa dimulai oleh pengelola dari masyarakat atau pemerintah desa, serta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Proses ini harus dilakukan dengan komprehensif dan efektif untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 ada, namun belum detail mengatur penegerian atau pengalihan status satuan PAUD.

Secara prinsip, penegerian PAUD adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ada dua cara penegerian: (1) inisiatif dari masyarakat penyelenggara atau pemerintah desa, diusulkan oleh yayasan atau pemerintah desa; dan (2) inisiatif dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, berdasarkan studi kelayakan dan kesepakatan dengan berbagai pihak terkait.⁴³

a. Persyaratan

⁴² Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020.

⁴³ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020.

Didalam persyaratan penegerian sebuah paud terdapat beberapa persyaratan diantaranya, persyaratan Administrasi dan persyaratan teknis.

Adapun persyaratan administrasinya ialah :

- 1) Surat permohonan penegerian satuan PAUD oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2) Surat kesepakatan bermaterai dari pihak-pihak terkait untuk penegerian satuan PAUD oleh masyarakat.
- 3) Surat kesepakatan bermaterai antara masyarakat atau penyelenggara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penegerian satuan PAUD.
- 4) Dokumen pendirian dan izin operasional satuan PAUD, termasuk NPSN dan bukti kepemilikan tanah.
- 5) Struktur organisasi satuan PAUD dengan keputusan pimpinan atau ketua pengurus, minimal terdiri dari pengelola, kepala sekolah, dan guru/pendidik.
- 6) Surat pernyataan bermaterai tentang kesiapan untuk menyerahkan penyelenggaraan dan aset satuan PAUD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7) Surat kesepakatan bermaterai untuk memastikan kelangsungan satuan PAUD selama proses penegerian.

- 8) Surat pernyataan dukungan dari berbagai pihak terkait penegerian satuan PAUD.⁴⁴

Kemudian, persyaratan teknis yang harus dimiliki sebuah Paud Swasta untuk penegerian diantaranya ialah :

- 1) Visi dan misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing- masing satuan PAUD
- 2) Sasaran usia peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (2 – 6 tahun) paling sedikit 2 (dua) rombongan belajar dengan jumlah peserta didik keseluruhan minimal jumlah anak 20.
- 3) Lahan yang berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai legalitas yang sah.

Proses persyaratan tersebut kemudian dijalani sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan melalui proses permohonan yang juga melibatkan pejabat setempat seperti Bupati/Walikota, Gubernur, serta Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Setiap instansi memiliki perannya dalam mempertimbangkan persetujuan penegerian tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing..⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020.

⁴⁵ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, pertama, 2020.

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan model studi kasus. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, menggambarkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.⁴⁶

Studi kasus merupakan rangkaian ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendalam dan terinci tentang suatu aktifitas, program dan peristiwa baik pada tingkat individu, kelompok organisasi maupun lembaga dalam memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Seringnya peristiwa yang dipilih yang disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events) bukan hal yang sudah lewat.⁴⁷

Pemilihan metode penelitian kualitatif didasarkan pada tujuan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan transformasi lembaga pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan negeri pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta. Selain itu, permasalahan penelitian yang diambil perlu diteliti dengan cara pengumpulan data yang mendalam, sehingga penelitian kualitatif ini cocok digunakan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali informasi

⁴⁶ Tabrani warul walidin, saifullah, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, ed. masbur, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5 (aceh: FTK Ar-raniry press, 2016).

⁴⁷ Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya,” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 4 (2017): 9–15.

secara lebih mendalam dan detail mengenai permasalahan penelitian yang diambil di TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

Model penelitian dengan menggunakan studi kasus dipilih oleh peneliti karena perlu adanya batasan dalam sistem (bounded system) dalam kasus yang di angkat guna penelitian ini terfokus pada aspek instrumental kualitatif.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang terletak pada jalan Suparman No.519, Wiroganjan, Kec. Mergansan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan tempat penelitian ini berdasarkan aspek utama yang jadi pertimbangan, salah satunya dari aspek topik permasalahan, yang artinya fenomena yang terjadi pada lembaga sekolah tersebut sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan peneliti. Perubahan status sekolah TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta sudah berlangsung sejak tahun 2021, dan proses terjadinya penegerian tersebut dilakukan pada rentang tahun sebelumnya. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2024 yang dilakukan setelah proposal penelitian diseminarkan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang atau sumber yang dijadikan sebagai sampel dalam suatu penelitian. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi

terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melaksanakan proses penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data penelitian kepada narasumber yang mempunyai kapasitas informasi dan mempunyai data penting terkait permasalahan yang di angkat yaitu penegerian pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, informan penelitian tersebut adalah orang-orang yang menyaksikan proses penegerian tersebut dan setelah terjadinya penegerian sekolah tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan objek atau situasi yang akan diteliti. Karenanya, peneliti menjadikan 4 (empat orang) sebagai informan, dan salah satunya merupakan *key informant*, diantara nya yaitu :

- a. Kepala sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang di tugaskan setelah proses penegerian selesai, dan mengetahui keadaan dan situasi setelah proses penegerian selesai.
- b. Kepala Tenaga Administrasi sekolah yang mengetahui dokumen dan menyaksikan hingga membantu proses penegerian dimulai dan masih berprofesi di sekolah tersebut setelah penegerian selesai dan sebagai *key informant* yang mengetahui permasalahan yang menjadi topik peneliti.

⁴⁸ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

- c. Guru yang merasakan dampak dalam melewati perubahan sekolah dan yang mengetahui tentang kegiatan yang ada pada sekolah.
- d. Wali murid yang merasakan dampak perubahan dari sekolah tersebut.

Penetuan subjek pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek penelitian dengan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono adalah langkah yang strategis dalam penelitian dan berguna untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data :

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu teknik mengumpulkan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dipakai ketika subjek kajian (informan) dan peneliti bertemu disatu tempat dan bertatap muka langsung dalam proses mendapatkan informasi.

⁴⁹ Syahrum Salim, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: citapustaka media, 2012), 142–44.

⁵⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 224.

Digunakannya wawancara ini guna mengumpulkan data dari hasil pemahaman persepsi dan pengetahuan informan secara spesifik.⁵¹

Peneliti melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan informasi tentang Transformasi TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.⁵² Observasi yang dilakukan peneliti merupakan observasi non partisipatif (non participatory observation), yakni peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, dan tidak terlibat dalam kegiatan. Dengan kata lain, peneliti mengamati serta mencermati keadaan sesuai dengan topik peneliti yaitu Transformasi/perubahan yang terjadi di TK Negeri 7 Kota Yogyakarta setelah melalui proses penegerian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mendukung informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara langsung. Proses dokumentasi ini melibatkan analisis berbagai dokumen seperti surat, pernyataan tertulis terkait kebijakan, dan berbagai tulisan

⁵¹ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, “Metode Penelitian Kualitatif” (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

⁵² Ruslan Rosady, “Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi” (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 33.

lainnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁵³ Teknik dokumentasi ini, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mencermati permasalahan yang di angkat mengenai Transformasi lembaga pendidikan Swasta menjadi Lembaga Pendidikan Negeri pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif untuk memahami dan menemukan makna, teori, dan pengetahuan baru dari data yang dikumpulkan. Menurut Sugiono, teknik analisis data merupakan tahapan kritis dalam proses penelitian kualitatif. Melalui analisis ini, hubungan dan konsep dalam data dipahami lebih dalam, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis..⁵⁴ Dalam rangka pengumpulan data, peneliti akan terjun ke lokasi berinteraksi dengan latar dan informan penelitian. Peneliti akan mempergunakan metode analisis berdasarkan dari Miles dan Hiberman⁵⁵ yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Perolehan data dari lapangan seringkali melibatkan jumlah yang besar, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan

⁵³ Suharmi Arikunto, “prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik” (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2010), 274.

⁵⁴ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 244.

⁵⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2009), 338–45.

analisis data dengan melakukan reduksi data. Reduksi data ini mencakup merangkum, memilih informasi yang krusial, dan fokus pada hal-hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses mengorganisir sekelompok informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat atau teks naratif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan format lainnya. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi yang terstruktur ke dalam suatu format yang koheren dan mudah dipahami. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah kesimpulan yang ditarik sudah tepat atau memerlukan analisis lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion: Drawing /Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Ini melibatkan interpretasi hasil analisis dan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian kualitatif haruslah baru dan sesuai dengan temuan yang ditemukan dari data, mempertahankan

kejelasan dan validitasnya. Verifikasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa makna yang diinterpretasikan dari data dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan konteks penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik ini melibatkan penggunaan *triangulasi*, yang mencakup triangulasi sumber dan teknik/metode, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan data yang dianalisis. Melalui triangulasi, peneliti membandingkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode untuk meminimalkan ambiguitas yang mungkin terjadi dalam interpretasi data. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk menguji konsistensi dan validitas hasil penelitian dari perspektif yang berbeda, sehingga meningkatkan keyakinan terhadap kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut.⁵⁶ Formulasi pemeriksaan keabsahan data mencakup derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Ini merujuk pada kualitas data yang dapat dipercaya, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi secara objektif dalam konteks penelitian.⁵⁷

⁵⁶ Andarusni Alfansyur and Mariyani, “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial” no 2, no. Historis 5 (2020): 146-50.57.

⁵⁷ sumasno hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 22, no. 1 (2019): 75.

- a. Triangulasi sumber adalah pendekatan untuk memvalidasi informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan observasi, serta memperoleh sudut pandang yang berbeda dari para informan.
- b. Triangulasi teknik digunakan untuk memvalidasi keandalan data dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Ini berarti peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh data dari sumber yang sama.⁵⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sejatinya sebagai upaya menggambarkan apa saja yang menjadi poin pembahasan yang ditulis secara struktural. Secara garis besar dalam penelitian ini mencakup 4 (empat) bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM : Pada Bab ini berisi tentang potret gambaran umum TK Negeri 7 Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. Pembahasan informasi tersebut mengenai profil lembaga yang meliputi,

⁵⁸ warul walidin, saifullah, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.

sejarah, letak geografis, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, program rutin dan unggulan sekolah, dan sarana prasarana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : pada bagian ini merupakan uraian hasil perolehan data dan analisa hasil penelitian berdasarkan kerangka teori penelitian. Dalam Bab ini peneliti cakupkan 3 (tiga) poin utama yaitu : Proses Transformasi TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi atau perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, Dampak positif dan negatif perubahan TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP : pada Bab ini memuat tentang Kesimpulan hasil penelitian serta saran peneliti berkaitan dengan topik penelitian dan penutup



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dan proses penelitian di lapangan yang telah dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa :

1. Proses Perubahan Bentuk Lembaga TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) Menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta mencakup beberapa hal.

Yang pertama ialah pemahaman kondisi dan keadaan TK PWS Surokarsan (PWS) ketika melangsungkan proses perubahan. Kondisi sekolah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah dipegang oleh yayasan TP-PKK Kota Yogyakarta. Seperti hal nya TK dan lembaga sekolah swasta lain nya, sumber dana sekolah itu bersumber dari BOSDA Swasta. Menjadi TK Negeri adalah nilai lebih bagi sekolah sebagai Inovator pendidikan di Kota Yogyakarta yang masih memiliki sekolah Negeri berkualitas yang jumlahnya sedikit untuk tingkatan PAUD.

Kedua yaitu tahapan transisi perubahan, Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah serta pengalamannya dalam memimpin proses perubahan, menjadi hal positif dalam proses *Movement* yang dilakukan, Kepala sekolah TK PWS pada tahun 2021 Ibu Lucia Siwi Astuti S.Pd sebelumnya juga memimpin proses penegerian TK Negeri 5 Kota Yogyakarta beliau menjadi kepala sekolah disana sebelum dipindahkan ke TK PWS yang berhasil di negerikan menjadi TK Negeri

7 Kota Yogyakarta. Proses perubahan yang berlangsung mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, mengikuti panduan penegerian satuan PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 473 Tahun 2021 tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri 7 Kota Yogyakarta. Taman Kanak-Kanak Negeri 8 Kota Yogyakarta, Taman Kanak-Kanak Negeri 9 Kota Yogyakarta.

Yang terakhir atau yang ketiga Tahapan keberlanjutan Perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, terdapat beberapa kebijakan, budaya, struktur organisasi dan peraturan baru yang ditetapkan. Pergantian pegawai terutama kepala sekolah, lalu guru yang belum menyandang status ASN sebagai syarat berlangsungnya TK Negeri. Kemudian pergantian budaya lama seperti penetapan seragam dan menyanyikan lagu indonesia raya di setiap pagi. Kemudian pada persyaratan penerimaan peserta didik baru, terdapat perubahan pada prosedur pelaksanaan nya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi TK PWS menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta dibagi menjadi Faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong perubahan terletak pada faktor internal yang ada karena pergantian pimpinan yaitu, kepala sekolah TK PWS tahun 2021 yaitu Ibu Lucia Siwi Astuti S.Pd yang pernah merealisasikan

penegerian dua sekolah, yaitu pada tahun sebelumnya TK Lempuyangwangi menjadi TK Negeri 5 Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian TK Persatuan Wanita Surokarsan (PWS) menjadi TK Negeri 7 kota Yogyakarta pada tanggal 25 November 2021, Hal itu merupakan dorongan bagi sekolah untuk berhasil melakukan perubahan sehingga tidak ada faktor penghambat yang terlihat maka perubahan lancar dan berhasil dilakukan.

3. Adapun Dampak positif dan Negatif dari perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta meliputi

- a. Dampak Positif Perubahan TK Negeri 7 Kota Yoyakarta secara Sumber Dana Operasional TK Negeri 7 Kota Yogyakarta yang sekarang berstatus Negeri bersumber dari beberapa sumber pendanaan, yang pertama bersumber dari BOSDA BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD melalui pengajuan RKAS (Rencana kegiatan Anggaran Sekolah), BOSDA Negeri berupa pengajuan proposal setiap bulan nya untuk jangka satu tahun dan nominalnya sebesar Rp60.000.000 yang diajukan bertaap, kemudian Uang Komite, yaitu iuran wali murid kepada pihak komite sekolah setiap bulan nya. Dampak positif lain nya seperti fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah yang bisa berupa barang atau dana. Walaupun sekolah masih merasa kurang akibat pengelolaan dana saat menjadi sekolah negeri merasa sulit dikembangkan karena jumlahnya yang terasa sangat minim dan mepet, juga harus melewati

prosedur prosedur yang ada. Animo masyarakat yang semakin bertambah menjadikan dampak positif bagi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta untuk menyekolahkan anaknya, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah.'

- b. Dampak Negatif yang ditimbulkan dari perubahan tersebut antara lain ialah pengelolaan keuangan yang tidak bisa dikembangkan karena tidak sepenuhnya berdasarkan rencana pengelolaan sekolah seperti semasa menjadi sekolah swasta sebelumnya. Dampak negatif tersebut hanya bersifat sementara karena proses peralihan dan penyesuaian yang ada. Hal itu sebenarnya menjadi ironi, karena TK Negeri menjadi unggul karena tidak memungut biaya atau gratis untuk masyarakat. Yang terakhirialah penggunaan aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan diluar kegiatan belajar mengajar sekolah, seperti kegiatan yang dilakukan oleh kepentingan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di TK Negeri 7 Kota Yogyakarta terkait dengan Analisis Transformasi Lembaga sekolah Swasta menjadi Lembaga Sekolah Negeri Studi Kasus TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, maka memuat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Kepada pihak sekolah untuk selalu mengembangkan potensi sekolah yang ada pasca perubahan menjadi TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, serta memanfaatkn setiap elemen yang ada dalam seiap perbaikan disektor

apapun. Selalu menjadi role model bagi sekolah lain agar terinspirasinya sekolah Negeri yang berkualitas dan menjadi contoh bagi sekolah lain serta animo besar di Kota Yogyakarta.

2. Kepada peneliti berikutnya diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi referensi tambahan yang berhubungan dengan Transformasi Lembaga Pendidikan Swasta Menjadi Lembaga Pendidikan Negeri. Peneliti berharap, penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tema ini dapat memperluas dan mampu mencapai ranah yang belum dicapai oleh peneliti dengan menggunakan teori dan konsep lain serta menggali lebih dalam detail yang tertinggal dari penelitian ini.

C. Penutup

Peneliti berharap dengan hasil penelitian “Analisis Transformasi Lembaga sekolah Swasta menjadi Lembaga Sekolah Negeri Studi Kasus TK Negeri 7 Kota Yogyakarta” dapat memberikan manfaat kepada sekolah pasca proses perubahan TK Negeri 7 Kota Yogyakarta. Peneliti juga ingin memohon maaf atas kesalahan kata dan penulisan serta keterbatasan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majir, Yohanes Kurniawan. "Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (n.d.): 155–71. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p270>.
- Agersi Diah Anggraini, Aswandi, M. Syukri. "PERUBAHAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AMALIYAH MENJADI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 6 (2018): 1–8.
- Atta Bhika Khoir. "MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945-1977." *Universitas Raden Mas Said Surakarta* 4, no. 1 (2023): 1–23.
- Bayu-arsita. "Tingkatkan Kualitas Pendiidkan, Pemkot Yogyakarta Tambah 3 TK Negeri." sorot.co. Diakses 1 Februari 2024. <https://jogja.sorot.co/berita-50596-tingkatkan-kualitas-pendiidkan--pemkot-yogyakarta-tambah--3-tk--negeri.html>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Desy Prastyani. "Model Perubahan Kurt Lewin dan John Kotter." In *MODUL MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN*, 0–22, 2020.
- Diantoro, Fery, Institut Agama, Islam Negeri, dan IAIN Ponorogo. "Implementasi Manajemen Personalia Pendidikan Islam Berbasis Pengabdian di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Jawa Timur" 5 (2020): 137–54.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur. "Metode Penelitian Kualitatif," 165. yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- dzawin Nur Ikram. "stand up comedy malam kebudayaan pesantren." yogyakarta, 2019. <https://youtu.be/jSNHiTizRMQ?si=7NzTwLIYncTRZize>.
- eka. "Mengenal 8 Standar Pendidikan Nasional: Pedoman untuk Keseragaman Mutu Pendidikan." Guru Inovatif, 2023.
- eka arifa. "Tiga TK Swasta yogyakarta berubah status menjadi sekolah Negeri." *Antara Yogyakarta*. 25 November 2021.
<https://jogja.antaranews.com/berita/522181/tiga-tk-swasta-yogyakarta-berubah-status-menjadi-sekolah-negeri>.
- . "Yogyakarta Kembali Ubah dua status TK Swasta Menjadi Negeri." Antara Yogyakarta, 2022. <https://jogja.antaranews.com/berita/565865/yogyakarta-kembali-ubah-dua-status-tk-swasta-menjadi-negeri>.
- Eri Marlapa. "DEFINISI DAN KONSEP MANAJEMEN PERUBAHAN." In *Manajemen Perubahan*, 2018.

- fuad ihsan, ed. *Dasar-dasar kependidikan.* jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997, n.d.
- Hanum, Farid ah. “Evaluasi Penegerian Madrasah.” *Al-Qalam* 21, no. 2 (2016): 235. <https://doi.org/10.31969/alq.v21i2.230>.
- hasbullah. *Dasar-dasar ilmu pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia, menteri pendidikan dan ebudayaan Republik. “Permendikbud NO 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,” 2014.
- Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik. “Peraturan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaran Paud” 4 (2017).
- kemendikbud, Direktorat pendidikan anak usia dini. *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.* Pertama., 2020.
- Kemendikbudristek. “JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (PAUD) PER PROV. D.I. YOGYAKARTA,” 2024. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/040000/1/all/34/all>.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda da Olahraga Kota Yogyakarta. “Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Non Real Time Online (NON RTO),” no. 11 (2024).
- Khair, Hubbil. “peran lembaga pendidikan dalam masyarakat di era modern.” *jurnal ilmiah kegamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan* 12 (2021): 24–36.
- Mariyani, Andarusni Alfansyur and. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial” No 2, no. Historis 5 (2020): 146-50.57.
- Merriam-Webster. “Transform | Definition of Transform.” Diakses 30 Januari 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transform>.
- Mohammad Nuruddhalam Bakri. “Transformasi Sistem Lembaga Pendidikan Pada Yayasan Najmhi Dhabit Kiram Pakualaman Yogyakarta.” *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, 1–91.
- Mudjia Rahardjo. “STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA.” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM malang* 4 (2017): 9–15.
- Nafsa Ariana. “Studi Dampak Perubahan Status Sekolah Menjadi Sekolah Negeri Pada Sikap Siswa Program Studi Teknik Survey Pemetaan SMK PU Negeri Jawa Barat.” *universitas Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Nurliyati Rahayu. “implementasi strategi marketing MIX dalam Pemasaran Jasa Pendidikan di TK Negeri 2 Yogyakarta.” *Jurnal pendidikan islam anak usia dini* 2, no. 1 (2020): 80–101.

- nurwintari. "pra observas." yogyakarta, 2024.
- Nurwintari. "Pra-Observasi penelitian," 2024.
- Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Sebagaimana." *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020*, 2020.
- Purwo Djatmiko. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." surabaya: Anugerah, n.d.
- Robbins, marry, Stephen P. *Management*. new jersey: Pearson Prentice Hall., 2007.
- Robi, Fajriyatur. "Urgensi kualitas pendidik yang sesuai dengan kebijakan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan." *review pendidikan dan pengajaran* 7 (2024): 409–19.
- Ruslan Rosady. "Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi," hlm 33. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- sella melati. "Jenjang pendidikan di Indonesia berdasarkan undang-undang." Linov HR. Diakses 12 Februari 2024. <https://www.linovhr.com/jenjang-pendidikan/>.
- sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif," hlm. 244. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," hlm 224. bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," 338–45. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharmi Arikunto. "prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik," 274. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2010.
- sumasno hadi. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 22, no. 1 (2019): 75.
- suriya jaya. "Manajemen perubahan di sekolah." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. April (2021): 82–94.
- Syafril, Zelhendri zen. "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan." Jakarta : Prenadamedia Group, 2020, hal 38.
- syahrum salim. "Metode Penelitian Kualitatif," 142–44. bandung: citapustaka media, 2012.
- TK Negeri 7 Kota Yogyakarta. "google maps," 2024.
- Tohirin, Ahmad. "PROSES PERUBAHAN STATUS MADRASAH SWASTA MENJADI MADRASAH NEGERI." *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan* 1, no. September (2018): 270–78.
- warul walidin, saifullah, Tabrani. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF &*

GROUNDED THEORY. Diedit oleh masbur. *Ar-Raniry press.* Vol. 5. aceh: FTK Ar-raniry press, 2016.

“Wawancara dengan Dwi Astuti, Staff Guru TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 30 Mei 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.,” n.d.

“Wawancara dengan Lucia Juwarinah, Kepala Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 30 Mei 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.” n.d.

“Wawancara dengan Nurul Anwar, Wali Murid TK Negeri 7 Kota Yogyakarta,30 Mei 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.,” n.d.

“Wawancara dengan Nurwintari, Tenaga Admnistrasi Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 30 Mei 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.,” n.d.

“Wawancara Pra-Observasi dengan Lucia Juwarinah, Kepala Sekolah TK Negeri 7 Kota Yogyakarta, 10 Maret 2024 di Ruang Tamu TK Negeri 7 Kota Yogyakarta.,” 2024.

Zahara Idris. *Dasar-Dasar Kependidikan.* bandung: angkasa, 1981.

